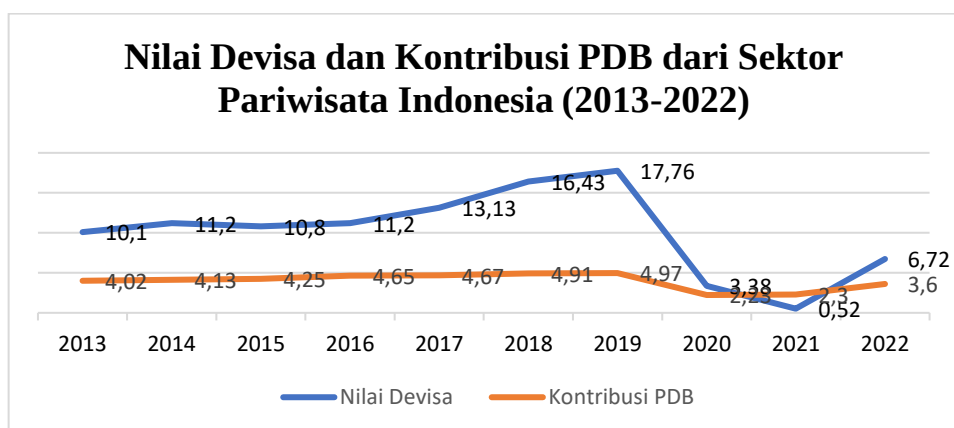


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia secara tekun berusaha memulihkan sektor pariwisata guna mengembalikan vitalitasnya agar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap tantangan dan keterpurukan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama dampak pandemi Covid-19 terhadap industri pariwisata. Pemulihan dan pembangunan sektor pariwisata menjadi sangat krusial, mengingat sektor ini memberikan sumbangan pendapatan devisa signifikan bagi Indonesia dan menjadi penggerak utama perekonomian karena mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru serta mendorong ekspansi dan minat investor di sektor perjalanan dan pariwisata (Nawangsari & Rahmatin, 2022).



Gambar 1.1. Nilai Devisa dan Kontribusi PDB dari Sektor Pariwisata Indonesia

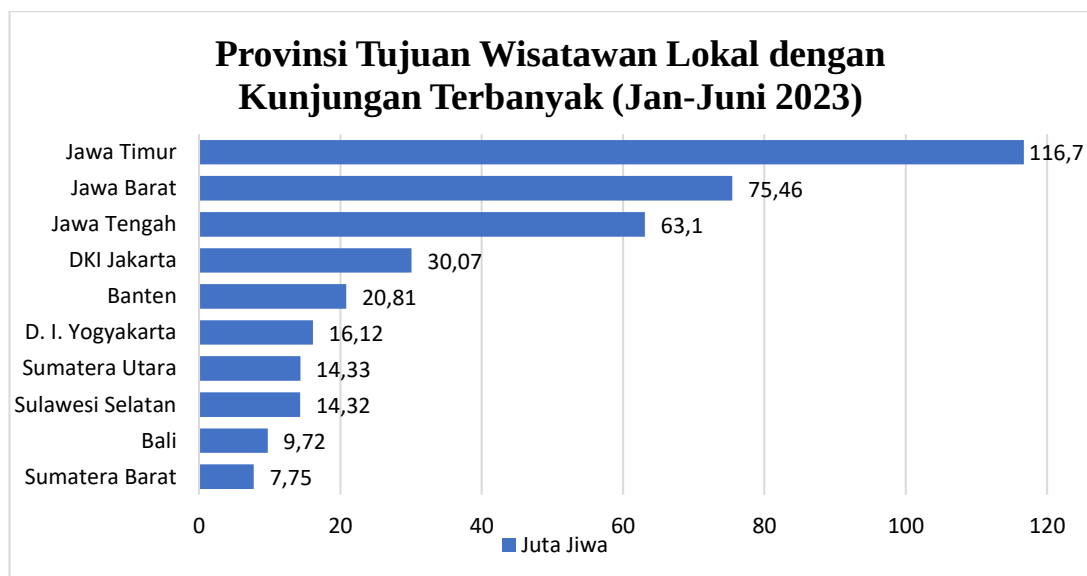
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (2023).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan warisan budaya, memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi tujuan wisata utama global. Menurut statistik yang diberikan oleh World Economic Forum pada Mei 2022, Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) tahun 2021 mencatat bahwa pariwisata Indonesia berada di peringkat ke-32 dari 117 negara. Capaian tersebut juga membawa Indonesia untuk unggul dari negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Dengan demikian, pengelolaan dan pembangunan sektor pariwisata menjadi semakin penting.

Program pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya wisata diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi karena industri pariwisata telah muncul sebagai sumber pendapatan potensial bagi daerah. Daerah yang menyadari potensi pariwisatanya, dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Sektor pariwisata memiliki kekuatan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penciptaan barang seni dan budaya, mendorong pembangunan yang adil, dan memperluas pasar global untuk barang-barang UMKM (Riswanto & et al, 2023). Ketika industri pariwisata tumbuh dengan sukses, maka kontribusinya terhadap pendapatan daerah juga akan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya daerah yang mengelola sektor pariwisata dengan serius dan mengangkatnya sebagai sektor unggulan seperti Bali, Lombok, Jogjakarta, dan kota-kota lain di Indonesia (Duadji & Kagungan, 2021).

Letak geografis negara dan sumber daya yang dimiliki menjadi sebuah keuntungan karena memunculkan keberagaman potensi daerah dalam mengembangkan wisata sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Selain itu,

keragaman budaya daerah dari Sabang sampai Merauke menjadikan hal tersebut sebagai daya tarik utama bagi wisatawan lokal dan internasional. Industri pariwisata masih mempunyai banyak ruang terhadap potensi budaya dan kearifan lokal, bahkan mungkin akan menjadi tren di masa depan (Rahma, 2020). Hal ini terbukti dari data yang dikemukakan oleh CNN Indonesia (2024) bahwa dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 lalu, kunjungan wisatawan domestic pada semester pertama tahun 2023 meningkat 12,57% menjadi 433,57 juta perjalanan.



Gambar 1.2. Data Provinsi Tujuan Wisatawan Lokal dengan Kunjungan Terbanyak (Jan-Juni 2023)

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023).

Bisnis pariwisata bergantung pada volume pengunjung. Jawa Tengah menempati posisi ketiga dalam provinsi dengan pengunjung wisata terbanyak se-Indonesia. Capaian tersebut merupakan hal yang menakjubkan mengingat bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan signifikan pada kunjungan wisata di Jawa Tengah yang semula berjumlah 57.900.863 wisatawan nusantara

(wisnus) dan 691.699 wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2019 menjadi 22.629.085 wisnus dan 78.290 wisman pada tahun 2020. Adapun kota/kabupaten di Jawa Tengah dengan kunjungan wisata terbanyak yakni sebagai berikut;

Tabel 1.1. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah
Kota Semarang	3.640.591
Kabupaten Klaten	3.303.423
Kabupaten Magelang	1.889.177
Kabupaten Banyumas	1.795.352
Kabupaten Semarang	1.746.076

Sumber: Disporapar Jawa Tengah, (2022).

Tren perjalanan wisata saat ini berkembang dengan kemunculan motif dan pola perjalanan baru, terutama di kalangan wisatawan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan kesadaran yang kuat terhadap isu-isu lingkungan hidup dan penguatan masyarakat serta budaya daerah (Nina Mistriani et al., 2023). Pola perjalanan pariwisata kini bergeser menuju aktivitas pariwisata yang lebih luas dengan orientasi pada apresiasi terhadap alam atau budaya lokal dengan tujuan memperkaya pengalaman, proses belajar, dan wawasan wisata. *"Embellished Escapism"* adalah salah satu megatren dalam pariwisata pada tahun 2023 (Kemenparekraf, 2023). *Embellished Escapism* merupakan tren yang muncul karena preferensi wisatawan yang memiliki minat untuk menemukan pengalaman liburan unik. Budaya memainkan peran penting untuk menciptakan pengalaman pariwisata yang unik dan berkesan. Oleh karena itu, saat ini, mengunjungi desa menjadi salah satu alternatif pariwisata yang populer di Indonesia.

Pertumbuhan desa wisata di Indonesia terjadi sangat cepat dan hampir menjangkau setiap provinsi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh dukungan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, yang dilaksanakan antara tahun 2009 dan 2014. Setelah itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang kepada pemerintah tingkat desa untuk mengelola prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, desa wisata baru bermunculan di berbagai wilayah di tanah air sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi pengembangan pariwisata dan keinginan pasar untuk menjajaki alternatif wisata, khususnya dalam hal ini desa wisata.

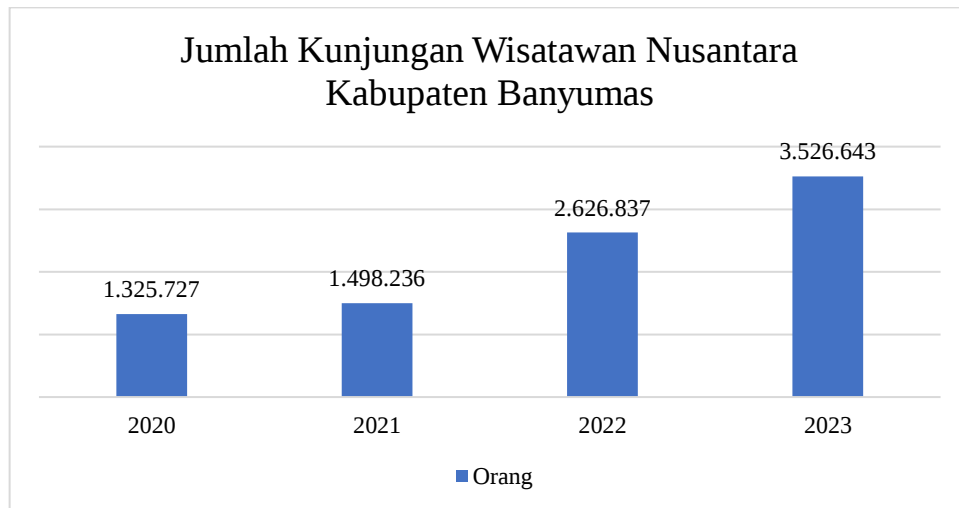


Gambar 1.3. Provinsi dengan Desa Wisata Terbanyak di Indonesia

Sumber: Jadesta, (2024).

Banyumas sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah memiliki peluang yang besar dalam memberdayakan dan mempromosikan desa wisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata sejalan dengan potensi Kabupaten Banyumas dalam menciptakan desa wisata. Selain Jawa Tengah yang menduduki peringkat ketiga desa wisata terpopuler di Indonesia, Kabupaten

Banyumas menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang banyak menerima kunjungan wisatawan nusantara. Daya tarik wisata Kabupaten Banyumas pun secara konsisten mengalami peningkatan dilihat dari jumlah wisatawannya.



Gambar 1.4. Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Kabupaten Banyumas

Sumber: Disporapar Jawa Tengah, (2023).

Kabupaten Banyumas diberkahi dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Mayoritas wilayahnya terdiri dari desa-desa yang memiliki potensi wisata unik dan beragam. Potensi dan kearifan lokal yang kental inilah menjadi daya tarik utama dalam menawarkan pengalaman wisata yang unik dan berkesan. Sesuai dengan ciri geografisnya, Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang terdiri dari daerah aliran sungai Serayu, perbukitan dan pegunungan, serta hutan tropis di lereng Gunung Slamet. Selain itu, desa-desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga memiliki segala kualitas yang diperlukan untuk berkembang menjadi tempat wisata populer, antara lain dari aspek budaya, adat istiadat, makanan khas, dll. Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinporabudpar Banyumas, pada tahun 2024 terdapat 20 desa wisata di wilayah Banyumas.

Tabel 1.2. Desa Wisata Kabupaten Banyumas

No.	Nama Desa Wisata
1.	Desa Karanggintung
2.	Desa Melung
3.	Desa Banjarpanepen
4.	Desa Karangsalam
5.	Desa Karangtengah
6.	Desa Kemutuglor
7.	Desa Petahunan
8.	Desa Karangkemiri
9.	Desa Cikakak
10.	Desa Kalisalak
11.	Desa Menari Tambaknegara
12.	Desa Pekunden
13.	Desa Kalibagor
14.	Desa Pekuncen
15.	Desa Pesona Kejawar
16.	Desa Tamansari
17.	Desa Glempang
18.	Desa Petahunan
19.	Desa Samudra
20.	Desa Gerduren

Sumber: Dinporabudpar Banyumas, (2022).

Setiap desa mempunyai potensi yang berbeda-beda, baik yang sudah dikembangkan maupun belum. Pengelolaan dan fase pengembangan kawasan wisata desa juga berbeda-beda dari satu desa ke desa lainnya (Bambang, 2019). Salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang tengah berusaha membangun desa wisata yakni Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh. Banjarpanepen merupakan

desa dengan potensi yang melimpah, baik dari segi kekayaan alam maupun dari budayanya. Kekayaan alam, budaya dan sejarah yang ada kemudian dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata Desa Banjarpanepen.

Tabel 1.3. Destinasi Wisata Desa Banjarpanepen

1.	Wisata Alam	1. Bukit Pangaritan 2. Curug Kelapa 3. Kali Cawang
2.	Wisata Buatan	1. Taman Wisata Sentana
3.	Wisata Budaya	1. Tradisi Ruat Bumi 2. Tradisi Takhiran 1 Sura 3. Tradisi Kungkum Purnama 4. Pertunjukkan Lengger 5. Pertunjukkan Ebeg 6. Pertunjukkan Kenthongan
4.	Wisata Sejarah	1. Makam Petilasan Mbah Satur 2. Panembahan Bojong 3. Panembahan Kali Tengah 4. Panembahan Martelu
5.	Paket Edukasi	1. Pembuatan Gula kristal 2. Pembuatan Karag 3. Budidaya Madu Klanceng

Sumber: Dolanbanyumas, (2024).

Pembangunan di suatu daerah dapat menumbuhkan potensi besar bagi kesejahteraan masyarakatnya, asalkan dilakukan dengan perencanaan, pengadministrasian, dan keterpaduan yang matang oleh pihak-pihak terkait dalam suatu wadah yang tepat. Masyarakat memegang peranan penting sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam kesuksesan pembangunan pariwisata.

Pemberdayaan dalam pengembangan desa wisata juga ditujukan untuk membimbing masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam di desanya dengan merangsang lebih banyak kreativitas dan inovasi dalam hal tersebut. Sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan terkait pariwisata, penting untuk mempertimbangkan posisi, potensi, dan peran masyarakat sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan (Handayani et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan suatu desa wisata harus dilaksanakan berbarengan dengan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pengembangan potensi wisata di Banjarpanepen juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini yakni peningkatan kemampuan ekonomi. Namun, pada kenyataannya bahwa Desa Banjarpanepen masih termasuk ke dalam salah satu desa dengan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Sumpiuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Sumpiuh Bapak Ahmad Suryanto dalam Radar Banyumas (2024) bahwa pada tahun 2023, empat desa di Kecamatan Sumpiuh dilaporkan menjadi desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Desa-desa tersebut adalah Bogangin, Banjarpanepen, Ketanda, dan Selanegara.



Gambar 1.5. Kemiskinan Ekstrem Kecamatan Sumpiuh

Sumber: Radar Banyumas, (2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengembangan pariwisata yang ada pada kenyataannya tidak membawa dampak signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Padahal tujuan dari pengadaaan dan pengembangan desa wisata adalah untuk menggali potensi lokal yang ada sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat desa tersebut. Ambarsari et al., (2022) menyatakan bahwa melalui berbagai inisiatif pemberdayaan, masyarakat didorong untuk memperoleh keterampilan sesuai dengan potensinya dan harus mampu berdiri sendiri, berdaya saing, dan mandiri. Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, desa wisata seharusnya tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang dikelola secara komersial, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat ekonomi kreatif berbasis komunitas, seperti pengembangan produk lokal, kerajinan tangan, kuliner khas desa, dan paket wisata berbasis budaya. Dengan memberikan pelatihan yang lebih terarah dan akses permodalan yang lebih luas, masyarakat miskin dapat lebih aktif berkontribusi dalam ekosistem wisata dan mendapatkan sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat secara konseptual digambarkan oleh Sumodiningrat (2009) dalam (Fitrianesti & Muhtadi, 2022) sebagai suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersatu untuk membuat rencana dan keputusan secara kelompok dalam rangka mengatasi permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan dalam masyarakat berdasarkan sumber daya dan potensi yang mereka miliki. Desa Banjarpanepen disebut sebagai salah satu desa wisata dengan daya tarik wisata yang unggul dan potensial menjadi desa wisata

yang maju (Philip Jehamun, 2023). Namun, pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen cenderung stagnan karena meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2013 dan kunjungan wisatawan ke beberapa destinasi wisata di Desa Banjarpanepen yang menunjukkan tren positif, Banjarpanepen masih tergolong sebagai desa wisata dalam kategori rintisan. Desa wisata rintisan merupakan desa wisata yang mempunyai potensi besar, tetapi masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang pariwisata (Ani Wijayanti & Yitno Purwoko, 2022).

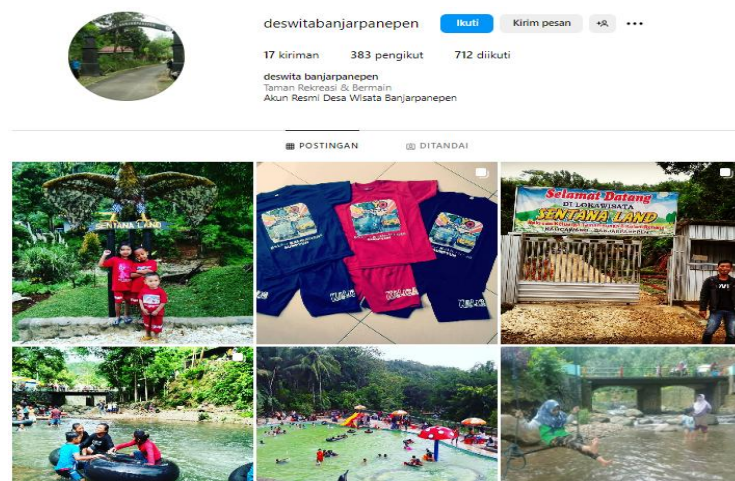
Tabel 1.4. Data Kunjungan Wisatawan Desa Banjarpanepen

Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan		
	2021	2022	2023
Taman Wisata Sentana	11.238	16.684	27.396
Bukit Pengaritan	2.703	9.400	14.395
Jumlah	13.941	26.048	41.791

Sumber: Diskominfo Banyumas, (2024).

Desa Wisata Banjarpanepen, meskipun telah mencapai tingkatan rintisan dalam pengembangan desa wisata, menunjukkan bahwa desa ini masih jauh dari kemandirian dalam hal pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisatanya. Sebagai desa yang baru memulai perjalanan dalam dunia pariwisata, desa ini menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi sebelum mencapai tahap kemandirian. Kemandirian sebuah desa wisata tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan daya tarik wisata yang ada, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada pihak eksternal.

Proses pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan yang ada di Desa Wisata Banjarpanepen. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan desa wisata perlu dibekali dengan keterampilan yang memadai, baik dalam hal manajemen, pemasaran, pelayanan wisata, hingga pengelolaan sumber daya alam yang ada. Tanpa pemberdayaan yang cukup, masyarakat akan kesulitan dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Permasalahan inilah yang kemudian muncul dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen. Masyarakat, khususnya pihak pengelola masih mengalami keterbatasan dalam kemampuan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Desa Wisata Banjarpanepen tidak lagi secara aktif dilaksanakan sejak terakhir pada tahun 2019, dimana ketersediaan media sosial pun belum dimanfaatkan dengan baik. Desa Wisata Banjarpanepen memiliki Instagram sebagai media promosi pariwisatanya. Akan tetapi, Instagram tersebut tidak terkelola dan tidak lagi mempublikasikan postingan baru sejak postingan terakhir pada tahun 2019.



Gambar 1.6. Media Sosial Instagram Desa Wisata Banjarpanepen

Sumber: Instagram

Pemberdayaan tidak hanya mencakup aspek keterampilan teknis, tetapi juga harus mencakup aspek peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan. Desa Wisata Banjarpanepen perlu memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menjaga kelestarian alam dan budaya, serta bagaimana mengelola potensi wisata yang ada dengan bijaksana. Hal ini karena muncul permasalahan lain terkait dengan kondisi fasilitas yang tidak terkelola dengan baik. Infrastruktur yang seharusnya mendukung kenyamanan wisatawan, seperti gazebo, tempat parkir, toilet umum, serta sarana pendukung lainnya, sering kali kurang terawat atau bahkan terbengkalai. Minimnya pengelolaan fasilitas ini tidak terlepas dari kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya perawatan dan pengelolaan berkelanjutan.



Gambar 1.7. Fasilitas Wisata Banjarpanepen yang Terbengkalai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, (2024).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Putri dan Suminar (2023) mengungkapkan bahwa faktor internal yang berpengaruh signifikan dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata adalah potensi yang dimiliki, baik alam maupun sumber daya manusia. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat Desa

Wisata Banjarpanepen, potensi alam yang dimiliki sebenarnya sangat melimpah. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam potensi sumber daya manusianya, dimana mereka belum mampu untuk mengelola desa wisata yang ada. Sementara itu, faktor internal ini pun harus didukung dengan faktor eksternal lain, contohnya dukungan kebijakan maupun regulasi pemerintah. Peraturan Gubernur Jateng No. 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Desa Wisata menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam mengelola wisata. Dukungan regulasi ini memberikan payung hukum yang jelas bagi desa wisata, namun pada praktiknya, belum semua desa wisata mampu mengimplementasikan regulasi tersebut secara maksimal. Studi dari Goodwin & Santilli (2009) menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak diikuti dengan mekanisme implementasi efektif sering kali menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan desa wisata, sehingga hanya kelompok tertentu yang mendapatkan manfaat, sementara kelompok lain tetap dalam kondisi ekonomi yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu elemen penting yang mendasari perkembangan desa wisata secara berkelanjutan. Tanpa adanya pemberdayaan yang memadai, masyarakat lokal mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka, yang pada gilirannya dapat menghambat keberlanjutan desa wisata tersebut. Proses pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan yang baik, serta memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam aspek-aspek seperti

pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan fasilitas wisata, serta pengembangan budaya lokal. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen harus diatasi dengan baik sehingga keberadaan program desa wisata ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengentaskan Desa Banjarpanepen dari kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, studi ini akan menelisik lebih dalam terkait proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat dilakukan perbaikan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Desa Banjarpanepen masih termasuk ke dalam salah satu desa dengan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2023.
2. Pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen yang belum menunjukkan kemandirian dalam pengelolaannya sehingga cenderung stagnan sebagai desa wisata rintisan meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2013 dan dengan kunjungan wisatawan yang menunjukkan tren positif.
3. Keterbatasan masyarakat, khususnya pihak pengelola dalam kemampuan melakukan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Desa Wisata Banjarpanepen tidak lagi secara aktif dilaksanakan sejak terakhir pada tahun 2019, dan ketersediaan media sosial yang belum dimanfaatkan dengan baik.

4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mendukung pemeliharaan fasilitas wisata sehingga banyak fasilitas-fasilitas seperti toilet, gazebo hingga *stand* UMKM yang terbengkalai.
5. Kekayaan potensi yang dimiliki Desa Banjarpanepen tidak disertai dengan kemampuan dari sumber daya manusia dan implementasi dukungan kebijakan pemerintah yang memadai.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan ilmu administrasi publik khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Desa Banjarpanepen, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas untuk mengetahui jangkauan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen dan sebagai pertimbangan dalam menetapkan tindakan kebijakan maupun program di masa depan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen sehingga berguna dalam membantu pengembangan wisata di Desa Banjarpanepen agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada usaha peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang topik yang akan diteliti dengan memeriksa studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam penelitian saat ini, serta membantu peneliti dalam mendalami teori topik penelitian. Dalam bagian ini, peneliti menyertakan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan kemudian merangkainya dalam sebuah tabel seperti berikut ini:

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/ TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Panjaitan, M., Harahap, R. H., & Munthe, H. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. <i>Perspektif</i> , 12(1), 171-184.	Menganalisis proses dan tahapan pemberdayaan dalam pengembangan wisata desa Kuta Jungk	Tahap-Tahap Pemberdayaan	Kualitatif Deskriptif	Konsep pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan.
2.	Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. <i>Publika</i> , 323-334.	Mengkaji pentingnya pemberdayaan masyarakat	Teori Pemberdayaan oleh Delivery dalam Totok Mardikanto (2013)	Deskriptif kualitatif	Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam teori Tim Delivery (Totok Mardikanto, 2013: 125-127) yang terdiri dari tahap seleksi lokasi, sosialisasi, pemberdayaan, dan tahap pemandirian masyarakat di Desa Hendrosari telah terpenuhi.
3.	Ramdhani, D. S., & Rahaju, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Komunitas Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya). <i>Publika</i> , 953-968.	Mendeskripsikan proses pemberdayaan	Proses pemberdayaan menurut Mulyawan (2016)	Deskriptif kualitatif	Fokus penelitian pada aspek proses <i>enabling</i> , <i>empowering</i> dan <i>protecting</i> berhasil diselenggarakan melalui pemanfaatan bank sampah dengan beberapa komponen inovasi program

4.	Sutama, I. K. G. S., Dewi, N. D. U., & Rahayu, L. R. (2023). Pengembangan Pariwisata dengan Community Based Tourism di Desa Wisata Penatih Denpasar. <i>Jurnal Studi Perhotelan dan Pariwisata</i> , 2(1), 1-11.	Mengetahui penerapan CBT sebagai instrumen pembangunan masyarakat sekitar objek wisata di Desa Penatih	Potensi desa wisata menurut Maryani (1991)	Kualitatif Deskriptif	Perlunya pemanfaatan potensi wisata alam desa wisata penatih sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Denpasar dengan secara aktif melibatkan masyarakat sebagai aktivis wisata melalui konsep Community Based Tourist (CBT) sebagai metode pengembangan wisata
5.	Fitrianesti, R., & Muhtadi, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan. <i>Jurnal Pemberdayaan Masyarakat</i> , 10(1), 23-30.	Menganalisis proses dan tahapan kegiatan pemberdayaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh	- Tahapan Pemberdayaan Menurut Soekanto (1987) - Indikator Kemandirian Masyarakat Desmita (2011)	Kualitatif Deskriptif	Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan telah berhasil menciptakan kemandirian dengan indikator meliputi keinginan kuat untuk mengembangkan diri, bertanggung jawab terhadap aktivitas, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif.
6.	Gohori, O., & van der Merwe, P. (2022). Tourism and community empowerment: the perspectives of local people in Manicaland province, Zimbabwe. <i>Tourism planning & development</i> , 19(2), 81-99.	Mengkaji pandangan dan perspektif masyarakat pedesaan lokal di Manicaland, Zimbabwe mengenai pariwisata dan pemberdayaan masyarakat.	Area Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian berargumen bahwa meskipun pengembangan pariwisata di Manicaland memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologis, tanda-tanda ketidakberdayaan masih terlihat.
7.	Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan	Mendeskripsikan proses pemberdayaan	Proses pemberdayaan	Kualitatif deskriptif	Proses pemberdayaan berbasis potensi lokal dilakukan melalui tahap

	Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. <i>ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya</i> , 3(2), 93-103.	masyarakat berbasis potensi lokal, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan dan strategi dalam menangani hambatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Kokolaka	menurut Sulistyani (2004)		penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan dan kecakapan, serta tahap pengayaan/peningkatan kapasitas. Faktor pendukungnya meliputi kesadaran dan semangat yang dimiliki oleh masyarakat, serta motivasi. Faktor penghambat seperti kurangnya konsistensi semangat masyarakat, perbedaan pendapat, dan kurangnya komitmen. Strategi yang digunakan mengatasi hambatan meliputi musyawarah bersama dan peninjauan kegiatan secara rutin.
8.	Lapuz, M. C. M. (2023). The Role of Local Community Empowerment in the Digital Transformation of Rural Tourism Development in the Philippines. <i>Technology in Society</i> , 74, 102308.	Analisis bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal mempengaruhi transisi melalui transformasi digital	Teori Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Aspek Pemberdayaan		Pemberdayaan berdasarkan aspek individu, gender, politik, dan sosial. Pemberdayaan individu merupakan peningkatan kemampuan teknis dan penetapan tujuan yang lebih tinggi, sedangkan pemberdayaan gender mengarah pada spesialisasi kesetaraan gender. Pemberdayaan politik dicapai melalui peningkatan pengaruh mereka dan pengambilan peran sebagai pengambil keputusan. Sebaliknya, pemberdayaan sosial mendorong pembangunan jaringan

					industri dan penerapan pendekatan yang berpusat pada keluarga.
9.	Khalid, Shahrukh, et al. (2019). Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism. <i>Sustainability</i> , 11(22), 6248.	Mengkaji hubungan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pariwisata berkelanjutan	Teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Sutawa (2012)	Mix method	Pemberdayaan masyarakat memiliki dampak yang kuat dalam memfasilitasi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara pemberdayaan masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap pariwisata.
10.	Agustang, A., Adam, A., & Upe, A. (2021). Community Empowerment Strategy towards a Sustainable Rural Community-based Tourism Village. <i>Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry</i> , 12(3).	Menganalisis potensi Desa Bira menjadi desa berkelanjutan dengan pariwisata berbasis masyarakat dengan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat	Konsep wisata pedesaan (Wijijayanti, dkk., 2020), Konsep Pariwisata Berbasis Komunitas (Yanes, et al., 2019), dan Konsep wisata berkelanjutan (Zolfani, dkk., 2015)	tipe studi kasus kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan di desa ini untuk mendukung terwujudnya Desa Bira sebagai Perdesaan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Pariwisata.

Sumber: Jurnal yang diolah peneliti, (2024).

Tabel 1.5. menunjukkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat telah diterapkan dalam berbagai aspek program pembangunan, termasuk dalam hal ini yakni terkait pengelolaan desa wisata. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses ataupun memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui pemanfaatan potensi yang ada disekitar tempat tinggalnya. Jurnal di atas berkontribusi dalam penelitian ini sebagai pendalaman teori dengan topik pemberdayaan. Berdasarkan uraian jurnal penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat berbagai rumusan tahapan pemberdayaan yang berbeda-beda untuk menjelaskan proses dari pemberdayaan tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. tahun 2021 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu” menggunakan teori tahapan pemberdayaan oleh Tim Delivery dalam Totok Mardikanto (2013). Teori tahapan proses pemberdayaan tersebut merupakan teori yang sama yang juga akan digunakan oleh penulis dalam menjelaskan fenomena terkait proses pemberdayaan di Desa Wisata Banjarpanepen. Meskipun memiliki persamaan dari segi teori yang digunakan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni terkait variabel faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses pemberdayaan, dimana hal tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.6.2 Administrasi Publik

A. Definisi dan Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik didefinisikan sebagai proses kerja sama dari sekelompok orang (Pasolong, 2019) untuk melakukan pengendalian atas berbagai usaha dan urusan instansi pemerintah agar tujuannya tercapai (Y. Wayong, 2004) dengan proses pengorganisasian sumber daya dan personil public yang dikoordinasikan untuk melaksanakan perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan pengelolaan berbagai masalah dan kebijakan publik (Chandler & Plano, 1988). Dalam pandangan lain, Barton & Chapel dalam Indradi (2006) mengartikan administrasi public sebagai “*The Work of Government*”. Istilah tersebut merujuk pada pentingnya sektor administrasi publik dalam suatu negara sebagai suatu sarana dalam menjalankan fungsi yang vital dan signifikan seperti membangun demokrasi dan memberdayakan masyarakat (Frederick A. Cleveland dalam (Keban, 2006)).

Mengingat bahwa administrasi mencakup berbagai aspek, maka *scope* atau ruang lingkung administrasi public pun cukup kompleks sesuai pada bagaimana masyarakat berkembang dan permasalahan apa yang dihadapinya. Henry dalam (Pasolong, 2008) mengkategorikan *scope* administrasi publik sebagai berikut;

1. Organisasi publik, secara umum, berkaitan dengan jenis organisasi dan perilaku birokrasi.

2. Manajemen publik, yang meliputi manajemen sumber daya manusia, penganggaran publik, penilaian kebijakan dan produktivitas, serta sistem manajemen dan ilmu pengetahuan.
3. Implementasi, berkaitan dengan metode pelaksanaan kebijakan publik, privatisasi, manajemen antar pemerintah, dan etika birokrasi.

B. Paradigma Administrasi Publik

Pertumbuhan dan perkembangan suatu disiplin ilmu dapat diketahui dengan melihat perubahan paradigmanya. Paradigma adalah cara pandang bagaimana pemaknaan suatu situasi atau kondisi oleh individu (Kriyantono, 2020). Menurut Nicholas Henry (1975), dalam ilmu administrasi publik syarat suatu disiplin ilmu meliputi fokus dan lokus. Fokus mengkaji pendekatan fundamental yang diambil untuk mengatasi suatu permasalahan, sedangkan lokus mencakup setting atau lingkungan dimana pendekatan tersebut diterapkan. Nicolas Henry mengemukakan enam paradigma-paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma 1: Dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926)

Dikotomi politik dan administrasi diawali dengan tulisan Frank J. Goodnow dalam bukunya *Politik dan Administrasi* (1900). Otoritas pemerintah dibagi menjadi dua peran berbeda dalam buku Goodnow yakni politik dan administrasi. Studi administrasi publik berfokus pada isu-isu dengan masalah penganggaran dan kepegawaian dalam birokrasi dan pemerintahan. Sementara isu-isu politik, pemerintahan,

dan kebijakan adalah inti dari ilmu politik. Permasalahan dimana seharusnya administrasi publik berada merupakan lokus paradigma ini.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini tidak mempersoalkan masalah lokus administrasi negara, yang penting adalah pada fokus, yaitu, gagasan bahwa "prinsip-prinsip administrasi" berlaku secara universal untuk semua bentuk organisasi dan dapat digunakan di negara mana pun, walaupun terdapat perbedaan konteks sosial budaya masing-masing negara. Gulick & Urwick menegaskan bahwa prinsip-prinsip sangat penting dalam administrasi sebagai ilmu, adapun tidak terlalu penting di mana prinsip akan digunakan. Perencanaan, Organisasi, Kepegawaian, Pengarahan, Pelaporan, dan Penganggaran (POSDCORB) merupakan prinsip administrasi terkenal yang dikembangkan oleh Gulick & Urwick.

3. Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Secara singkat dijelaskan bagaimana hubungan konseptual antara ilmu politik dan administrasi publik sedang dibangun kembali selama fase paradigma ini. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu perlunya untuk merancang bidang administrasi publik, setidaknya dalam bidang keahlian utamanya. Menurut Umar (2004:5) sepanjang era ini, terjadi perkembangan administrasi public yang menjadi bagian dalam ilmu politik. Maka dalam paradigma ini terjadi dua perkembangan yang signifikan: (1) penerapan *case study* secara luas sebagai strategi

pembelajaran dan (2) ditetapkannya studi banding dan pengembangan administrasi dalam subbidang ilmu administrasi.

4. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Paradigma keempat mengacu pada administrasi publik sebagai manajemen. Sejak beberapa sarjana sedang mengkonsolidasikan pandangan manajemen administrasi publik, hampir bertepatan dengan bukti ketiga bahwa ilmu politik tidak menang dalam situasi win-win. Jelas terlihat bahwa selama tahap 3 dan 4, kedua disiplin ilmu yang bersaing untuk mendapatkan jiwa administrasi publik hampir tidak mengubah lokus serta fokus untuk mengakomodasi ilmu-ilmu baru dan topik studi yang diselidiki oleh para akademisi perintis.

5. Paradigma 5: Administrasi publik sebagai Administrasi publik (NPM) (1970-1990)

Model ini memperjelas apa yang menjadi fokus dan lokus administrasi publik, yaitu teori organisasi, ilmu kebijakan, serta ekonomi politik. Sementara itu, isu dan kepentingan masyarakat menjadi lokus perhatian. Dalam titik ini, terdapat usaha yang dilakukan untuk menjadikan kembali disiplin ilmu sebagai bidang studi yang berdiri sendiri. Dalam paradigma ini, birokrasi dialihkan pada pasar serta sektor swasta, sementara hierarki menjadi fokusnya. Maka dalam hal ini, paradigma administrasi publik tradisional digantikan oleh pendekatan NPM. Paradigma ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan inefisiensi sistem administrasi.

6. Paradigma 6: Governance (1990-sekarang)

Konsep governance bukanlah hal baru tetapi telah memperoleh makna dan aplikasi baru dari akhir 1980-an dan 1990-an. Paradigma ini menggarisbawahi bagaimana semua paradigma sebelumnya mempunyai kecenderungan berorientasi pada pemerintahan, sementara peran sektor swasta dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintahan sama sekali diabaikan karena administrasi publik memusatkan seluruh penekanannya pada sektor pemerintahan (Anjas Muharman, dkk. 2023). Namun paradigma governance ini lebih memberikan penekanan mengenai pentingnya kolaborasi dan kesetaraan antara ketiga sektor, yang mencakup pemerintah, sektor bisnis/swasta, dan masyarakat sipil, dalam menyediakan pelayanan (Rodiyah et al., 2021).

Adapun penelitian ini termasuk dalam paradigma governance. Hal tersebut didasarkan pada fokus penelitian ini yang akan meneliti mengenai pemberdayaan Desa Wisata Banjarpanepen. Seperti yang diketahui, bahwa pemberdayaan masyarakat mengindikasikan adanya peran atau keterlibatan sektor lain dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan publik. Keterlibatan aktor lain selain pemerintah dalam hal ini sesuai dengan paradigma governance karena mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintahan.

1.6.3 Manajemen Publik

A. Definisi dan Konsep

Manajemen publik merupakan konsep yang berasal dari istilah “manajemen” dan “publik”. Menurut Stoner sebagaimana dikutip dalam Handoko (2016) manajemen diartikan sebagai proses pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas individu dalam suatu organisasi, serta alokasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sementara itu, publik umumnya mengacu pada masyarakat atau warga negara yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah dan memiliki kepentingan dalam urusan publik. Oleh karena itu, istilah "manajemen publik" menggabungkan kata "manajemen" dan "publik" untuk menggambarkan seni sekaligus ilmu, yang dipraktikkan secara sistematis, logis, dan metodis dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, agar menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Nugroho, 2017).

Berdasarkan definisi yang diberikan, manajemen publik dicirikan sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan dalam organisasi publik untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Proses ini ditandai dengan kolaborasi dan memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini menekankan pada pemberian pelayanan prima dengan tetap berpegang pada fungsi manajemen, yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kepuasan dan memenuhi tujuan masyarakat umum.

B. Fungsi Manajemen Publik

Manajemen publik sebagai salah satu dari domain administrasi publik diterapkan untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan aktivitas organisasi dalam pencapaian sasarannya. Lebih lanjut, Henry Fayol dalam (Nugroho, 2017), mengklasifikasikan lima fungsi manajemen yang dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan: Fungsi ini penting untuk pembuatan rencana, tahapan, dan strategi yang tepat di awal pengembangan organisasi karena fungsi ini menentukan dan merencanakan bagaimana suatu kegiatan akan berjalan sejalan dengan tujuan awal organisasi. Peran ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang mempunyai dampak signifikan terhadap seberapa baik manajemen diterapkan dalam suatu perusahaan.
- b. Pengorganisasian: Fungsi ini melibatkan identifikasi peran dan tanggung jawab yang tepat bagi sumber daya manusia organisasi untuk menempatkan orang-orang dengan keterampilan yang tepat untuk pekerjaan yang ada dan memfasilitasi keberhasilan penerapan program manajemen organisasi.
- c. Pengarahan: Tujuan pengarahan adalah untuk memungkinkan anggota melakukan tugas yang diberikan kepada mereka dengan cara yang efektif dan efisien sehingga ketika tugas diselesaikan sesuai keinginan, pencapaian tujuan akan menjadi sederhana.

- d. Koordinasi: Dalam sebuah organisasi yang individu-individunya berasal dari berbagai latar belakang, menemukan titik temu untuk perspektif dan tujuan bersama dapat menimbulkan sebuah tantangan. Meskipun demikian, memupuk kesamaan tersebut memungkinkan anggota organisasi untuk berkolaborasi secara efektif dalam penyelesaian tugas.
- e. *Controlling*: Pengawasan atau pengendalian yang efektif sangat penting untuk memastikan efektivitas fungsi-fungsi yang disebutkan di atas. Mekanisme pengendalian diperlukan untuk menilai apakah program berfungsi sesuai rencana, mendekati tujuannya, atau memerlukan evaluasi dan peningkatan.

1.6.4 Pemberdayaan Masyarakat

A. Definisi dan Konsep Pemberdayaan

Salah satu komponen pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) adalah pemberdayaan. Sumaryadi dalam (Hannaji et al., 2022) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk mempersiapkan masyarakat sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan masyarakat agar dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Adapun Manteiro (2023) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya pemberian sarana, peluang, informasi, dan kemampuan kepada masyarakat

untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat yang berdampak pada kehidupan sehari-hari di dalam ruang lingkup masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma baru dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian kepada masyarakat lokal. Untuk mewujudkan perubahan sosial, pemberdayaan harus mencapai sejumlah tujuan termasuk membangun masyarakat yang berdaya yang dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat fisik, ekonomi, dan sosial serta mampu menginspirasi orang lain, meningkatkan harga diri, menafkahi dirinya sendiri, terlibat dalam kegiatan sosial secara terus-menerus, dan menjadi mandiri dalam melaksanakan aktivitas kehidupan (Setiadi & Pradana, 2022).

Suharto menyebutkan setidaknya pemberdayaan mempunyai komponen pemberdayaan yakni inisiatif peningkatan kapasitas; kegiatan terorganisir dan kelompok; meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan memberikan prioritas kepada kelompok yang lemah atau kurang beruntung. Sementara itu, Pitana dalam Sari (2020) menyatakan bahwa gagasan pemberdayaan masyarakat harus mempunyai tiga unsur, yaitu:

1. *Enabling Setting*, yakni usaha untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik sehingga mendukung penguatan kreativitas masyarakat lokal. Konsep ini berusaha menciptakan panggung bagus di mana penduduk setempat bisa menunjukkan potensinya.

2. Penguatan lingkungan. Setelah lingkungan yang baik untuk berkegiatan telah diciptakan, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mereka agar mampu memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Pendekatan ini meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia lainnya.
3. *Socio-Political Support*: Ketika lingkungan yang baik telah tersedia dan masyarakat setempat telah mampu menggunakan potensi mereka, dukungan sosial-politik menjadi penting. Dukungan ini mencakup dukungan dari berbagai pihak, seperti dukungan sosial, politik, jaringan kerja sama, dll. Tanpa dukungan yang memadai, masyarakat setempat mungkin tidak dapat menunjukkan kreativitasnya dengan baik, meskipun sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukannya.

B. Proses dan Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan pembangunan alternatif yang lebih fokus pada partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui proses pemberdayaan memerlukan serangkaian tahapan. Anthony Bebbington dalam Rakhmadian & Arif (2023) mengidentifikasi tiga komponen utama proses pemberdayaan masyarakat meliputi *enabling*, *empowering* dan *protecting*. *Enabling* merujuk pada upaya memfasilitasi terciptanya lingkungan yang dapat

menginspirasi, mendorong, dan meningkatkan pemahaman mengenai pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan potensi yang telah ada. *Empowering* merupakan peningkatan kapasitas melalui penguatan potensi untuk menciptakan peluang dan memberikan berbagai input yang terkait dengan pasar. *Protecting*, yakni perlindungan kepentingan melalui pembuatan sistem yang bertujuan untuk menghentikan persaingan tidak sehat dan metode bisnis yang menyimpang demi melindungi masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan dilaksanakan dengan berbagai cara. Adapun menurut Mardi dalam (Setiani & Sugiyanto, 2021) program pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan dalam berbagai kegiatan, antara lain:

1. Dukungan Finansial. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam hal bantuan modal karena tanpa bantuan modal, mereka tidak akan mampu melakukan tindakan apa pun untuk memperbaiki situasi mereka sendiri atau lingkungan mereka.
2. Dukungan Pembangunan Infrastruktur. Bantuan pembangunan infrastruktur merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan memperlancar operasional mereka sehari-hari.
3. Dukungan Pendampingan. Peran dukungan pendampingan adalah bertindak sebagai mediator masyarakat dan mendorong pembelajaran atau introspeksi. Kurangnya pemahaman antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan yang dituju menjadi faktor yang mendorong perlunya bantuan.

4. Penguatan Kelembagaan. Membantu masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai fasilitas yang diperlukan, antara lain dana, media musyawarah, dan lain sebagainya.
5. Memperkuat Kemitraan: Gagasan ini berfokus pada kemitraan yang diperkuat oleh kedua belah pihak, dan pertumbuhan besar hanya mungkin terjadi jika ada kemitraan skala kecil dan menengah. Dengan kata lain, pertumbuhan yang signifikan terjadi ketika ada kerjasama antara berbagai ukuran atau tingkatan entitas ekonomi, baik itu kecil, menengah, maupun besar.

Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendekatan bertahap agar dapat meningkatkan efektivitas dan signifikansi dari pemanfaatan obyek yang diberdayakan. Sulistyani dalam Putri & Suminar (2023) menyatakan bahwa tahapan proses pemberdayaan yang perlu diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pembentukan Kesadaran dan Perilaku

Fase ini menandai dimulainya proses pemberdayaan, di mana masyarakat atau kelompok secara bertahap meningkatkan kesadaran dan perilaku mereka menuju kesadaran dan kepedulian yang lebih tinggi terhadap kondisi yang ada. Tujuan utama pada tahap ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendukung yang diperlukan untuk memungkinkan keberhasilan proses pemberdayaan. Pada titik ini, intervensi sosial sebagian besar terkonsentrasi pada peningkatan kapasitas masyarakat atau kelompok untuk mencapai kesadaran yang

diinginkan, sehingga meningkatkan keterbukaan dan pemahaman mereka akan kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan mereka.

2. Tahap Transformasi/Pemberian Kemampuan

Setelah memahami pentingnya pengembangan kapasitas, masyarakat akan menjalani proses pembelajaran yang menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan mereka. Pada tahap ini, masyarakat diberikan informasi dan kemampuan yang dibutuhkan agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kemahiran dalam kemampuan dasar yang penting.

3. Tahap Meningkatkan Keterampilan Intelektual:

Tujuan tahap ini adalah untuk meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat atau komunitas agar lebih mandiri dan mampu berinisiatif serta kreatif. Pada titik inilah diperlukan tingkat kecerdasan dan kompetensi yang lebih tinggi agar seseorang atau kelompok mampu mandiri. Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengambil alih, berkreasi, dan berinovasi terhadap lingkungannya inilah yang menentukan kemandirian. Pada titik ini, masyarakat dipandang mampu menyelesaikan proses pembangunan secara mandiri.

Menurut Dwidjowiyoto dan Wrihatnolo (2007), tahapan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Kesadaran

Pada tahap ini, subjek pemberdayaan, yaitu masyarakat, diberi pemahaman bahwa mereka memiliki potensi dan hak untuk mengembangkan diri. Masyarakat juga diberi motivasi untuk mulai mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan potensi. Tahap penyadaran meliputi edukasi masyarakat dengan melakukan sesi penyuluhan atau kegiatan penjangkauan. Proses ini dimulai dengan merekrut peserta dan meluas hingga melibatkan masyarakat melalui penjangkauan informasi.

2. Tahap Penguatan Kapasitas

Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, agar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola peluang yang diberikan. Tahap ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, dan kegiatan serupa lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan keterampilan hidup masyarakat.

Proses peningkatan kapasitas mencakup tiga bidang utama meliputi individu, organisasi, dan sistem nilai. Peningkatan kapasitas manusia melibatkan pemberdayaan individu baik pada tingkat pribadi ataupun dalam kelompok melalui pelatihan, seminar, dll. Adapun peningkatan

kapasitas organisasi berfokus pada restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menerima dan memanfaatkan kekuasaan atau kapasitas. Sementara itu, peningkatan kapasitas sistem nilai melibatkan penetapan “aturan main” yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan setelah individu dan organisasi diberdayakan.

3. Tahap Pemberdayaan

Masyarakat diberi kesempatan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki mereka melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk memberikan peran yang semakin besar kepada masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas mereka, serta mengakomodasi aspirasi mereka. Selain itu, masyarakat juga dituntun untuk melakukan evaluasi diri terhadap pilihan dan hasil dari pelaksanaan pilihan tersebut.

Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pendapat lain diberikan oleh The Delivery Team dalam (Wahyuningsih & Pradana, 2021), mulai dari proses seleksi lokasi hingga pemberdayaan masyarakat. Masing-masing fase tersebut jelasnya sebagai berikut:

1. Seleksi Lokasi

Masyarakat, pihak kepentingan dan lembaga semuanya sepakat mengenai kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan daerah. Menetapkan kriteria penting untuk memastikan pemilihan lokasi

dilakukan sebaik mungkin dan mencapai hasil pemberdayaan masyarakat yang diinginkan.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya memperkenalkan kegiatan yang akan diselenggarakan melalui dialog dengan masyarakat. Masyarakat dan pihak terkait akan lebih memahami rencana inisiatif dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berkat sosialisasi. Karena akan memastikan minat atau keinginan masyarakat untuk bergabung (ikut dan aktif) dalam program pemberdayaan masyarakat yang sedang dibicarakan, maka proses sosialisasi menjadi hal yang krusial.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk menaikkan taraf hidupnya merupakan tujuan mendasar dari pemberdayaan masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan terlibat dalam kegiatan berikut selama proses pemberdayaan ini.

- a) Menentukan dan Mengevaluasi Potensi serta Permasalahan. Tujuan dari aktivitas ini yakni untuk membantu masyarakat menjadi kompeten dan percaya diri dalam mengenali dan mengevaluasi keadaan mereka, termasuk masalah apa pun yang mungkin terjadi.
- b) *Team Building*. Membuat strategi kegiatan kelompok berdasarkan temuan penelitian mendalam dan analisis pemecahan masalah terhadap isu-isu terkini.

c) Membuat Rencana dan Melaksanakannya Melalui Tindakan.

Jalankan rencana kegiatan kelompok, seperti yang dibuat melalui kerja sama dengan pendamping untuk fasilitasi, dan kemudian ubah menjadi kegiatan nyata dengan tetap menjaga kesadaran akan ide dan realisasi awal.

d) Observasi dan Penilaian. Berpartisipasi dalam proses yang sedang berlangsung dan evaluasi hasil kegiatan (monitoring & evaluasi partisipatif). Pada setiap tingkat pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan evaluasi ekstensif dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut mencapai tujuannya.

4. Pemandirian Masyarakat

Maksud dari pemandirian masyarakat adalah memberikan bimbingan dan pendampingan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk benar-benar mampu mengelola program-programnya sendiri.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Cheema dan Rondinelli dalam (Gunawan et al., 2018) mengatakan bahwa pemberdayaan dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain kondisi lingkungan, meliputi budaya, ekonomi, sosial, hukum, dan alam (geografis); Sumber daya adalah sumber daya yang digunakan untuk memperoleh manfaat dari penerapan suatu program; dan Sifat dan kapasitas agen pelaksana yang digunakan dalam proses mewujudkan program dan

menentukan apakah tujuan program tercapai atau tidak. Pelaksana program harus memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan di bidang terkait. Adapun menurut Mardikanto & Soebianto (2013) dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik mengemukakan faktor utama yang dapat mendorong maupun menghambat pemberdayaan masyarakat, yaitu:

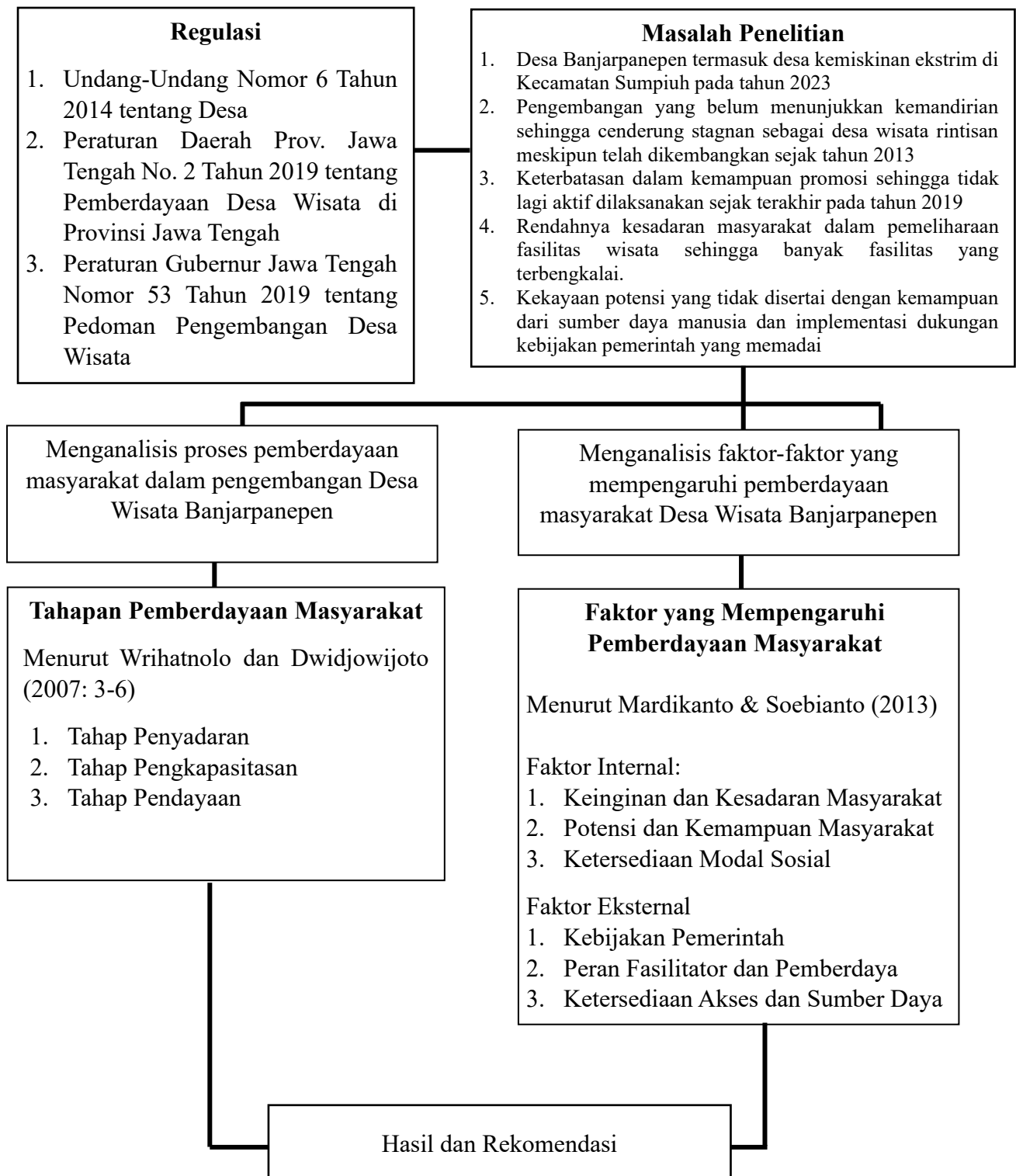
1. Faktor Internal:

- a. Keinginan dan Kesadaran Masyarakat: Faktor ini merupakan kunci utama dalam pemberdayaan. Masyarakat harus memiliki keinginan dan kesadaran untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri. Tanpa adanya keinginan dan kesadaran, program pemberdayaan apapun tidak akan berhasil.
- b. Potensi dan Kemampuan Masyarakat: Masyarakat memiliki potensi dan kemampuan yang beragam. Pemberdayaan haruslah menggali dan mengembangkan potensi dan kemampuan tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Ketersediaan Modal Sosial: Modal sosial, seperti kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang positif, dapat menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Modal sosial yang kuat dapat membantu masyarakat untuk bersatu padu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

2. Faktor Eksternal:

- a. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat dan mendukung pemberdayaan masyarakat sangatlah penting. Kebijakan tersebut dapat berupa regulasi, program-program, dan anggaran yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
- b. Peran Fasilitator dan Pemberdaya: Fasilitator dan pemberdaya memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam proses pemberdayaan. Mereka haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan mengambil tindakan.
- c. Ketersediaan Akses dan Sumber Daya: Masyarakat harus memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan.

1.6.5 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, (2024)

1.7. Operasionalisasi Konsep

Untuk memperoleh batasan yang jelas, penulis menyederhanakan pemikiran mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui operasionalisasi konsep berikut:

Tabel 1.6. Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Definisi Konsep	Sub fenomena	Gejala
Proses Pemberdayaan Masyarakat	Proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen adalah suatu upaya sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik dengan melalui tahapan penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan.	Penyadaran	1. Identifikasi potensi dan masalah 2. Penyuluhan / sosialisasi 3. Keinginan masyarakat untuk terlibat
		Pengkapasitasan	1. Pengkapasitasan Manusia 2. Pengkapasitasan Organisasi 3. Pengkapasitasan Sistem Nilai
		Pendayaan	1. Keberjalanan Program Desa Wisata 2. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang usaha 3. Bantuan yang diberikan
Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan	Faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal atau	Faktor Internal	1. Keinginan dan Kesadaran Masyarakat

	elemen yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu program, baik mendorong atau melemahkan kemajuan suatu kegiatan, usaha, atau produksi yang bersumber pada aspek internal maupun eksternal.		2. Potensi dan Kemampuan Masyarakat 3. Ketersediaan Modal Sosial
		Faktor Eksternal	1. Kebijakan Pemerintah 2. Peran Fasilitator dan Pemberdaya 3. Ketersediaan Akses dan Sumber Daya

1.8. Argumen Penelitian

Pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen telah dilaksanakan sejak tahun 2013, namun hingga saat ini desa tersebut cenderung stagnan dan masih termasuk ke dalam desa wisata kategori rintisan. Selain itu, pengembangan desa wisata juga dilakukan dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun pada tahun 2023, Desa Banjarpanepen justru masih salah satu desa dari empat desa dengan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Sumpiuh. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi dasar kajian mengenai analisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen Sumpiuh.

Pemberdayaan masyarakat digambarkan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui pemanfaatan potensi yang ada. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pemberdayaan tersebut, masyarakat dapat menerima manfaat dari adanya pengembangan potensi yang dimiliki yakni terkait pengembangan desa wisata

dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti peluang usaha maupun bekerja di bidang pariwisata tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini didapatkan dua rumusan masalah yakni bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen Sumpiuh dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proses pemberdayaan tersebut. Analisis tahapan pemberdayaan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (2007) dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan dilaksanakan untuk menjelaskan hal ini.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif menurut Wirartha (2006) adalah cara mengumpulkan informasi tentang topik penelitian melalui observasi dan wawancara, kemudian mengevaluasi dan merangkum temuan lapangan. Keputusan untuk menggunakan penelitian kualitatif karena tipe tersebut digunakan dengan tujuan menyajikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diselidiki dengan mengidentifikasi, dan menjelaskan secara metodis fakta-fakta yang ada untuk memungkinkan pemahaman atas fenomena penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Banjarpanepen Sumpiuh. Selaras dengan pendapat Waruwu (2023) bahwa pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendekatan penelitian yang mengkaji dan

mendeskripsikan kejadian, sikap, dan perilaku sosial pada tingkat individu atau kelompok melalui deskripsi verbal dan linguistik.

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan mengingat bahwa fenomena yang diteliti memerlukan observasi dan analisis yang lebih mendalam untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Untuk lebih memahami fenomena, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai teknik. Setelah itu, informasi yang didapatkan dikumpulkan, diperiksa dan dianalisis untuk dapat menghasilkan gambaran atau deskripsi fenomena. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik deskriptif untuk dapat menjelaskan lebih lanjut temuan penelitian sehingga fenomena tersebut dapat dijelaskan lebih menyeluruh dan informatif.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi di mana penelitian dilakukan, yang melibatkan pengumpulan data objektif untuk mengatasi suatu masalah atau subjek tertentu (Fitriani et al., 2022). Situs penelitian atau lokasi penelitian ini yaitu berada di Desa Wisata Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Desa Banjarpanepen sebagai suatu desa wisata yang telah dirintis sejak lama, namun perkembangannya cenderung stagnan dan bahwa desa tersebut justru termasuk desa dengan kemiskinan ekstrim.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian mengacu pada unit analisis, yakni orang perseorangan atau badan yang ingin diteliti oleh peneliti (Arikunto, 1998). Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan individu-individu yang menyediakan data dan informasi yang diperlukan peneliti terkait penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan informan, peneliti dapat membandingkan kejadian yang ditemukan dari individu yang berbeda hingga untuk mengkomunikasikan gagasan atau bertukar pikiran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi purposive sampling dalam pemilihan informan, yang berarti peneliti mempertimbangkan faktor-faktor tertentu saat memilih informan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi informan atau organisasi kunci yang benar-benar mengetahui pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Banjarpanepen. Oleh karena itu, informan penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1.7. Informan Penelitian

No.	Instansi/Asal
1.	Kelompok Sadar Wisata Gunung Mas
2.	Pemerintah Desa Banjarpanepen
3.	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Banjarpanepen
4.	Kelompok PKK Desa Banjarpanepen
5.	Masyarakat Desa Banjarpanepen
6.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
7.	Pemerintah Kecamatan Sumpiuh

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sebagai jenis data yang digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena sosial dalam penelitian. Muhadjir (1998) mengartikan data kualitatif sebagai data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk numerik. Data kualitatif tersebut didapatkan dari berbagai sumber, salah satunya yakni studi literatur dan wawancara dengan data kualitatif berupa transkrip wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan jenis data lain untuk mengumpulkan informasi terkait yang relevan dan untuk memperkuat serta mempermudah proses penelitian Adapun jenis data tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Data numerik, atau data yang disimpan secara digital dalam bentuk persentase, jumlah, frekuensi, rata-rata, dll. yang didapatkan melalui studi literatur maupun observasi; dan
2. Data gambar, yakni data yang disajikan dalam bentuk simbol, peta, foto, bagan, dan lain-lain yang berasal dari dokumentasi.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data didefinisikan sebagai keseluruhan hal yang menyediakan informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan, antara lain yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) data primer merujuk pada data yang dikumpulkan dari sumber aslinya. Data primer untuk penelitian ini

diperoleh langsung dan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan individu yang bertindak sebagai informan. Penelitian ini menggunakan narasumber khusus (*Key Informan*) sebagai subjek penelitian karena dipandang dapat mewakili para pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan topik yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai data informasi yang didapatkan secara tidak langsung melalui orang lain (Sugiyono, 2019). Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan berbagai dokumen, serta informasi lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain undang-undang, artikel, jurnal serta buku yang terkait dengan isu-isu penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni proses yang metodis dan terstandar untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data merupakan proses dimana peneliti mula-mula memilih teknik untuk mendapatkan data yang paling tepat, dilanjutkan dengan kompilasi data dan penggunaan alat atau instrumen tambahan (Arikunto, 1998). Teknik pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang diadopsi dalam penelitian ini dengan jenis observasi partisipan. Observasi partisipan dilaksanakan peneliti dengan keterlibatan dalam berbagai kegiatan subjek penelitian dalam tahapan penyelenggaraan proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Banjarpanepen. Selain itu, dengan melibatkan tindakan pengamatan dan pendokumentasian keadaan atau perilaku objek sasaran, peneliti melaksanakan kunjungan dan pengamatan langsung ke lapangan, mengkaji tingkah laku objek, gejala-gejala yang muncul di lokasi penelitian, mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang relevan, dan melakukan pengamatan terhadap berbagai kemungkinan adanya dimensi baru dalam rangka memahami fenomena penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui cara pengajuan pertanyaan, berbincang dengan informan, secara lisan dan tatap muka dengan memanfaatkan pedoman wawancara untuk mempelajari permasalahan penelitian yang kemudian tanggapan tersebut dicatat ataupun dapat dibantu dengan alat perekam untuk menangkap tanggapan narasumber. Peneliti melaksanakan wawancara terbuka yang artinya informan diberikan keleluasaan dalam menjawab pertanyaan sehingga didapatkan informasi yang menyeluruh dan mendalam.

Purposive sampling digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini untuk mendapatkan informan yang kemudian menggunakan metode

snowball sampling. Data sampel dipilih terlebih dahulu dilakukan dengan memilih individu yang mempunyai kekuasaan dan otoritas serta memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam konteks sosial atau fenomena yang diteliti untuk “membuka akses” bagaimana kelanjutan peneliti mengumpulkan data (Sugiyono, 2010).

3. Dokumentasi

Peneliti memanfaatkan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan tujuan memperoleh informasi guna membantu peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan berupa gambar-gambar yang diambil pada saat observasi dan wawancara.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik dalam mengumpulkan data atau informasi dengan membaca dan menganalisis literatur dan sumber yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pengumpulan data teoritis akan dimanfaatkan sebagai literatur pendukung untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan. Penelitian kepustakaan berasal dari data sekunder seperti literatur, buku dan jurnal yang berkaitan dengan fenomena penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2019:320), analisis data adalah proses mencari dan mengorganisir secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori, penguraian menjadi unit-unit, sintesis, penyusunan pola, pemilihan informasi yang penting, dan pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada metodologi analisis data kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2014) menyatakan analisis data secara kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas. Kegiatan interpretasi dan analisis data ini berfokus pada tiga elemen utama:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilaksanakan setelah pengumpulan data dengan memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dokumen tertulis, dan materi audio visual untuk mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Data yang tersedia akan disesuaikan untuk pembahasan yang berkaitan dengan basis teori. Peneliti akan memilah, menyusun, dan merangkum data yang sesuai dengan topik penelitian terkait proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

2. Penyajian Data

Tahapan dimana data disajikan dalam bentuk teks naratif atau bagan dengan pendeskripsian yang diuraikan secara singkat serta keterkaitan atau korelasi antar kategori sehingga didapatkan kumpulan informasi terstruktur untuk menarik kesimpulan dan perencanaan tindakan selanjutnya.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Langkah akhir dalam proses analisa data yaitu verifikasi dan penegasan kesimpulan. Dalam tahap ini, kesimpulan dapat dicapai melalui interpretasi dalam upaya menguraikan makna dan signifikansi data yang diberikan. Kesimpulan-kesimpulan awal dengan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan dalam literatur, sehingga temuan-temuan tersebut dapat dipercaya. Setelah data yang ada di lapangan dikumpulkan dan disajikan, data-data tersebut akan dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.9.8 Kualitas dan Keabsahan Data

Triangulasi menurut Sugiyono (2010) melibatkan verifikasi silang informasi dari berbagai sumber, menggunakan metode yang berbeda, dan melakukan pemeriksaan pada berbagai titik waktu. Metodologi triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas data dalam mempertanggungjawabkan kebenaran data penelitian. Ada dua macam metode triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber. Pengujian kebenaran data dilakukan dengan mendapatkan informasi yang berasal dari beberapa sumber yang saling berhubungan.
2. Triangulasi Teknik. Penentuan kebenaran informasi dengan menggunakan beberapa metode (seperti observasi, dokumentasi, wawancara, dll) untuk memverifikasi data pada sumbernya.

Melalui cara yang telah dikemukakan tersebut, peneliti mengumpulkan data yang bervariasi dari satu sumber yaitu data dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarpanepen Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Kemudian, uji keabsahan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut;

1. Melaksanakan wawancara mendalam terhadap informan sebagai tahap pertama dalam menentukan kebenaran data yang telah dikumpulkan peneliti. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan untuk menggali informasi terkait fenomena penelitian. Oleh karena itu, satu pertanyaan akan memunculkan pertanyaan lain untuk menggali informasi yang diteliti.
2. Melaksanakan uji silang untuk membandingkan informasi informan dengan informasi observasi lapangan.
3. Verifikasi temuan dengan menggunakan informasi dari sumber tambahan.